

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Karangwaru**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kelurahan Karangwaru merupakan bagian dari Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, terletak pada posisi 70° 49' 26" Lintang Selatan dan 110° 28' 53" Bujur Timur. Kelurahan Karangwaru terbagi dalam 5 wilayah dengan 14 RW dan 56 RT. Luas wilayah Karangwaru 0,7196 km<sup>2</sup> atau 71,96 Ha dengan pembagian 5 wilayah yaitu: Karangwaru Lor, Blunyahrejo, Petinggen, Bangirejo dan Karangwaru Kidul.

Batas wilayah Kelurahan Karangwaru:

Sebelah Utara : Desa Sindudadi, Kec. Mlati, mengikuti jl. Jambon dan batas Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman

Sebelah Selatan : Kelurahan Cokrodiningratan, Kec. Jetis, mengikuti batas antara Kec. Jetis dan Kec. Tegalrejo

Sebelah Barat : Kelurahan Kricak mengikuti Jl. Magelang

Sebelah Timur : Kelurahan Cokrodiningratan, Kec. Jetis mengikuti batas

... Secara keseluruhan wilayah Kelurahan Karangwaru relatif datar dengan variasi lereng kurang dari 0-2% dan berada di ketinggian rata-rata 144 mdpl. Kelerengan cukup curam berada di bantaran Sungai Code dan Sungai Buntung.

b. Hidrologi

Permukaan air tanah di Kelurahan Karangwaru cukup bervariasi berkisar 3m sampai 15m. Di beberapa wilayah kondisi air tanah ada indikasi tercemar oleh bakteri coli. Seperti di wilayah Blunyahrejo. Wilayah Karangwaru dilalui oleh dua sungai yaitu Sungai Code dan Sungai Buntung.

c. Iklim

Kelurahan Karangwaru beriklim tropis, suhu berkisar minimum 22°C - 25°C dan maksimum 30°C - 33°C.

d. Jenis Tanah

Berdasarkan jenis tanahnya di wilayah Kelurahan Karangwaru, sedikitnya memiliki 2 macam jenis tanah yang terdiri dari regosol dan kambisol yang berstruktur lepas-lepas (porus) dan berkesuburan sedang-baik.

3. Sosial Budaya dan Demografi

3.1. Struktur Sosial Budaya

Beberapa aktivitas penduduk yang ada dan membentuk struktur sosial tersendiri diantaranya adalah:

a. Aktivitas pemukiman padat penduduk di wilayah Bangirejo dan petinggen



Di Kelurahan Karangwaru terdapat 14 RW dan 56 RT dengan total jumlah penduduk 9.922 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.823 jiwa dan perempuan 5.099 jiwa, dengan spesifikasi usia 0-15 tahun 2.435 jiwa, usia 15-65 tahun 6.763 jiwa dan usia 65 keatas 656 jiwa.

**b. Struktur Penduduk**

- Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
TK	1.274 orang
SD	704 orang
SMP	1.262 orang
SMA/SMK	2.819 orang
Akademi/ D1-D3	612 orang
Sarjana	1.462 orang
Pascasarjana	162 orang

*Tabel 1.0 struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014*

- Berdasarkan Tingkat Mata Pencaharian

Di wilayah perkotaan karakteristik kegiatan masyarakatnya berorientasi pada sektor perdagangan dan karyawan swasta.

Pekerjaan/ Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
PNS	320 orang
ABRI	23 orang
Pegawai Swasta	1.968 orang
Wiraswasta/ Pedagang	1.008 orang
Tani	8 orang
Pertukangan	23 orang
Buruh Tani	4 orang
Pensiunan	300 orang

Nelayan	-
Pemulung	-
Jasa	45 orang

*Tabel 1.1 struktur penduduk berdasarkan tingkat mata pencaharian*

- Berdasarkan Jumlah KK Miskin

Jumlah KK miskin di Kelurahan Karangwaru hingga 2014 ialah 498 KK dengan 1.817 jiwa. Dengan UMR 1.173.300,-

#### 4. Eksisting Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kelurahan Karangwaru didominasi dengan peruntukan kawasan pemukiman 36,353 Ha (49,9%) dari luas keseluruhan wilayah Kelurahan Karangwaru sebesar 71,962 Ha. Kemudian luas pemanfaatan lahan yang cukup besar adalah kawasan perdagangan seluas 8,542 Ha (11,71%).

##### a. Kawasan Lindung

Sungai di Kelurahan Karangwaru meliputi Sungai Code yang berada di wilayah Petinggen dan Sungai Buntung di wilayah Karangwaru Lor, Blunyahrejo, dan Karangwaru Kidul. Sungai Buntung lebar rata-rata 2-5 m dan Sungai Code lebar rata-rata 5-10 m.

##### b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Kelurahan Karangwaru yang dikembangkan mencakup:

Kawasan pemukiman perkotaan dan pemukiman tepi sungai

Fasilitas umum dan sosial

Kawasan perdagangan dan jasa

Kawasan industri

Kawasan wisata

Kawasan pertanian

Berdasarkan letak dan posisi geografis dan karakteristik pemukiman, maka di Kelurahan Karangwaru pemukiman diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Pemukiman bermasalah/ pemukiman liar

Yaitu, pemukiman yang menempati secara ilegal dan pemukiman cenderung tidak tertata (pemukiman tepi sungai, pemukiman di tanah-tanah kosong)

2) Pemukiman swadaya

Yaitu, pemukiman yang berkembang secara turun menurun dan tumbuh berdasarkan aturan dan tertata sesuai dengan bidang rumah masing-masing

3) Rumah developer

Pemukiman yang direncanakan dengan kebutuhan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung kawasan ( perumahan Petingggen Permai dan Intan

## **B. Profil Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri**

### **a. Sejarah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Tridaya Waru Mandiri**

Pada tahun 1999, Rembug Warga Kelurahan Karangwaru yang dihadiri pengurus LKMD, ketua RT/RW, Tomas (tokoh masyarakat), Lembaga-lembaga di tingkat Kelurahan dan faskel, sepakat membentuk BKM yang diberi nama BKM Waru Arta Mandiri dengan akte notaris No. 1 tahun 2000. Kegiatan dari BKM ialah menggulirkan modal dari P2PK. Pada tahun 2007 lahir PNPM lanjutan dari P2PK yang kegiataannya meliputi UPL , UPS, UPK maka kesepakatan pada RTW diubah namanya menjadi BKM Tridaya Waru Mandiri dengan akte notaris No. 3 tahun 2007 dengan struktur organisasi, ada pimpinan kolektif, sekretariat, pengawas, UPL (Unit Pemantau Lapangan), UPS (Unit Pengelola Sosial), UPK (Unit Pengelola Keuangan), dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

### **b. Visi dan Misi BKM**

**Visi :** Terwujudnya masyarakat Kelurahan Karangwaru yang sejahtera, dalam pemukiman yang nyaman dihuni.

**Misi:**

Untuk mewujudkan visi BKM Tridaya Waru Mandiri maka BKM berupaya:

1. Mendayagunakan potensi modal sosial yang ada.
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui pengguliran dana yang ada di UPL

3. Merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Memberi pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada keluarga kurang mampu agar bangkit ekonominya.
5. Membangun sarana dan prasarana lingkungan yang tertata dan mudah diakses.
6. Mewujudkan kawasan pemukiman yang hijau, asri dan produktif.
7. Menggalakkan kesadaran masyarakat berpola hidup sehat dan air bersih.
8. Menciptakan kesadaran masyarakat yang tertib dan sadar hukum.
9. Menumbuh kembangkan potensi kehidupan perekonomian masyarakat.
10. Melestarikan dan mengembangkan budaya yang telah tumbuh berbasis kearifan lokal.
11. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

c. Tujuan BKM

- o untuk memimpin warga masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih terorganisir, terarah dan berkelanjutan
- o sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengelola berbagai program dan dana bantuan penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah, swasta dan kelompok peduli terhadap penanggulangan kemiskinan.

d. Fungsi BKM

- Penggerak dan penumbuh kembali nilai – nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat



- Penggerak proses pengembangan aturan dan kode etik dalam penanggulangan kemiskinan
- Penggerak proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, akuntabel dan demokratis dalam penanggulangan kemiskinan
- Pengendali dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan
- Motor penggerak dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat
- Wadah informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan
- Penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat
- Mitra kerja pemerintah desa/ kelurahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas masyarakat

e. Tugas BKM

- Merumuskan & menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis & partisipatif mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan
- Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana Program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis)
- Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan – keputusan yang diambil termasuk penggunaan dana-dana bantuan program

- Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari mulai tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring evaluasi
- Mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh unit-unit Satuan Pelaksana (Satlak) berbagai program sektoral
- Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di Desa/ Kelurahan
- Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan diwilayahnya, melalui proses dan hasil keputusan yang adil dan demokratis
- Membangun transparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan serta rapat-rapat terbuka dsb
- Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat
- Melaksanakan Rembug Warga Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil BKMD kepada masyarakat

- Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP UP, termasuk penggunaan keuangan
- Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan serta pembangunan wilayah desa/ kelurahan untuk dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Pemkot/Kab
- Mengawal penerapan nilai-nilai universal dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa/ kelurahan
- Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/ kelurahan dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).

f. Susunan Kepengurusan BKM Tridaya Waru Mandiri

*Bagan 1.1 – Struktur BKM Tridaya Waru Mandiri*

